

## Asesmen Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19 bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta

### *Assessment of Social Assistance During the Covid-19 Pandemic for Poor and Vulnerable Family in Special Region of Yogyakarta*

Istiana Hermawati<sup>1</sup> dan Johanis Risambessy<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta  
Jl. Timoho No 317 Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225.

Email: istiana1410@gmail.com, HP: 085228716070.

<sup>2</sup>LPPM Bina Insan Mandiri, Griya Kencana Permai Blok G1/5a

Jl. Wates Km 10 Sedayu, Bantul, Yogyakarta

Email: risambessyjojanis@gmail.com, HP: 085243992130

Naskah diterima tanggal 5 November 2021 Diperbaiki tanggal 14 Desember 2021 Disetujui tanggal 20 Desember 2021

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah melakukan asesmen tentang jumlah, nilai, dan kualitas bantuan sosial bagi keluarga miskin dan rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, melibatkan 150 responden yang diambil secara *purposive sampling*. Data dikumpulkan dua kali yakni pada masa awal pandemi Covid-19 (April-Juni 2020) dan saat pandemi Covid-19 melanda (Desember 2020) dengan menggunakan angket dan wawancara. Data dianalisis secara statistik deskriptif, disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada awal pandemi Covid-19 (Mei), persentase responden yang dapat mengakses bantuan sosial hanya 48% sedangkan pada bulan Desember 2020 persentase responden dalam mengakses bantuan sosial meningkat menjadi 100%. Bantuan sosial tersebut bersumber dari dana APBN, APBD, dan dana desa. Besaran bantuan sosial yang diterima responden sesuai dengan ketentuan dan berkualitas baik sehingga memiliki nilai kemanfaatan yang besar dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi bagi responden dan keluarganya. Ini menunjukkan kesungguhan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait di DIY dalam menangani bantuan sosial bagi keluarga miskin dan terdampak pandemi Covid-19. Penelitian ini merekomendasikan perlunya: (1) pelaksanaan verifikasi dan validasi data secara periodik dan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga data penerima bantuan sosial valid; (2) upaya sinergitas lintas program dan lintas sektoral agar pemberian layanan dan penyaluran bantuan sosial tidak tumpang tindih, (3) pengembangan model pemberdayaan berbasis komunitas untuk menopang ketahanan sosial keluarga dan menguatkan kapital sosial di masyarakat.

**Kata kunci:** asesmen; bantuan sosial; keluarga miskin; pandemi Covid-19

#### Abstract

*The purpose of this study is to conduct an assessment about amount, value, and quality of social assistance for the poor and vulnerable families in Special Region of Yogyakarta (DIY) during the Covid-19 pandemic. This study combines quantitative and qualitative approaches (mix methods), involving 150 respondents who were taken by purposive sampling. Data were collected twice at the early days of the Covid-19 pandemic (April-June 2020) and during the Covid-19 pandemic (December 2020) by using questionnaires and interviews. The collected data were analyzed descriptively and the presented in the form of tables and graphs. The results showed that at the beginning of the Covid-19 pandemic (May), the percentage of respondents who could access social assistance was only 48%, while in December 2020 the percentage of respondents in accessing social assistance increased to 100%. The budget for the social assistance comes from the State Budget, Provincial/ Domestic Budget, and Village Funds. The amount of social assistance received by the respondent is in accordance with the provisions and have good quality so that it has a great value of benefit in helping to fulfill the need for nutritious food for the respondent and his family. This shows the seriousness of the regional government and various related parties in DIY in handling social assistance for the poor families and those affected by the Covid-19 pandemic. This study recommends needs to: (1) do verification and validation of data periodically and synchronization with Integrated Social Welfare Data so that data on social assistance recipients is valid; (2) made synergical policies across programs and across sectors so that the provision of services and distribution of social assistance is not overlapped*

*each others, (3) development of community-based empowerment models to support family social resilience and strengthen social capital in the community.*

**Keywords:** *assessment, social assistance, low income families, the Covid-19 pandemic*

## **Pendahuluan**

Pada Desember 2019 penduduk di seluruh dunia dikejutkan dengan adanya penyebaran virus jenis baru, yakni *corona*. Virus dengan nama ilmiah *SARS-COV2* diidentifikasi muncul untuk pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China (Odriozola-González et al., 2020; Tan et al., 2020) dan penyakit dari virus ini disebut *Coronavirus Diseses 2019* atau Covid-19 (Yuliana, 2020). Covid-19 menyebar begitu cepat di dalam negeri China dan ke negara lain (Wenjun et al., 2020), serta menyebabkan krisis kesehatan dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, bahwa wabah yang disebabkan oleh virus corona dan telah menyebar ke seluruh dunia sebagai pandemi (Baig, 2020) dan menyebabkan krisis kesehatan global (Loey et al., 2021). Baik negara maju maupun negara berkembang dihimbau WHO agar serius menyiapkan langkah antisipatif terhadap ancaman virus ini karena semua negara memiliki peluang yang sama terdampak Covid-19.

Pandemi menurut Jubba (2021) & Bao et al., (2020) merupakan istilah kesehatan yang merujuk pada penyebaran penyakit yang menyerang orang dalam jumlah banyak. Sementara Yusuf et al. (2020), dalam memaknai Covid-19 lebih difokuskan pada dampak sosial, ekonomi hingga politik yang ditimbulkan akibat penyebaran Covid-19. Adapun Cooper et al., (2020) menyebutkan, bahwa pandemi Covid-19 menyangkut kombinasi kesejahteraan fisik dan mental. Beberapa pandangan tersebut memiliki kesamaan dalam melihat pandemi Covid-19, yakni sama-sama menekankan hubungan Covid-19 dengan ancaman universal bagi umat manusia (Anand et al., 2020). Pandemi bukan sekadar menimbulkan mortalitas secara global, tetapi juga memicu dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Pandemi Covid-19 terkonfirmasi masuk ke tanah air pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020, tepatnya saat ditemukan dua orang pasien positif yang menjalani proses perawatan di Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso. Covid-19 menyebar begitu cepat, dilansir dari situs Aljazeera (7/7/2020), lebih dari 535.000 orang meninggal karena Covid-19. Virus ini juga menyebabkan 11.4 juta orang (188 negara) telah terinfeksi. Kasus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2020 (saat penelitian ini berlangsung) merujuk pada data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, ditemukan bahwa jumlah pasien positif Covid-19 menyentuh angka 26.473 jiwa, jumlah pasien yang sembuh tercatat sebanyak 7.308 jiwa atau 27.6% dari jumlah keseluruhan kasus, sementara angka kematian pasien positif corona tercatat 1.613 jiwa. Angka ini setara 6,1 persen dari total kasus. Kasus D.I. Yogyakarta, dalam periode yang sama tercatat 236 kasus positif, dengan kasus sembuh sebanyak 161 kasus dan meninggal sebanyak 8 kasus. Sedangkan total PDP sebanyak 1.516, di mana 144 orang diantaranya masih dalam perawatan.

Dalam rangka penanggulangan Covid-19, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program bantuan sosial dan program bantuan khusus. Shahidi et al., (2019) menjelaskan, bahwa bantuan sosial merupakan program pemerintah yang memberikan dukungan pada tingkat penghasilan terendah bagi setiap penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Syawie et al., (2018) menambahkan, bahwa bantuan sosial merupakan tindakan negara dan lembaga swasta guna menyalurkan bantuan bagi kelompok tidak mampu atau rentan, sehingga dapat mengurangi kerentanan dan risiko terhadap pekerjaan serta meningkatkan hak dan status mereka yang hidup dalam kemiskinan

(Norton et al., 2020) sehingga berdampak bagi keluarga miskin dan rentan (Béland, D. & Daigneault, 2015). Bantuan sosial menjaga pemasukan dan akses layanan bagi penduduk miskin yang diberikan secara langsung dalam bentuk uang maupun barang terhadap risiko sosial (*Asian Development Bank*, 2020). Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai disebutkan, bahwa bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada individu, keluarga, hingga masyarakat miskin yang tidak mampu dan atau rentan terkena risiko secara sosial.

Program bantuan sosial dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, Bantuan Sosial Tunai, dan berbagai bantuan sosial lainnya telah berhasil menjangkau masyarakat lapisan bawah sehingga terpenuhi keperluan dasar pangan. Bantuan sosial ini merupakan jaring pengaman sosial (*Social Safety Net*), yang diberikan guna melindungi masyarakat akan kebutuhan dasar pangan. Sasaran program bantuan sosial adalah individu dan keluarga dengan keadaan sosial dan ekonomi yang rendah di lokasi pelaksanaan, yang identitasnya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial, rata-rata bantuan sosial diberikan kepada 9 juta-15 juta KPM. Tujuan dari pemberian bantuan sosial penanganan dampak Covid-19 adalah: (1) pemenuhan kebutuhan pokok (kebutuhan dasar pangan), (2) menjaga daya beli, dan (3) mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan.

Batubara (2020) menjelaskan, bahwa pada bulan Maret 2020, Kementerian Sosial telah memperluas sasaran penerima bantuan sosial reguleryang sedang berjalan, yakni program PKH dan sembako. Ketika Covid-19 teridentifikasi, pemerintah menegaskan bahwa keluarga yang belum mencapai kesejahteraan harus dilindungi dengan cara mendapatkan bantuan agar tidak semakin terpuruk. Pemerintah juga menaikkan

jumlah peserta PKH dari 9,2 juta menjadi 10 juta. Pada BPNT pun ada penambahan dari 15 juta menjadi 20 juta. Selain itu, indeks bantuan juga dinaikkan. Pada PKH, ada penambahan anggaran sebesar 8,3 Triliun sehingga total anggaran sebanyak 37,4T. Pada Program BPNT (Sembako), besaran bantuan naik dari 150 ribu menjadi 200 ribu (meningkat 30 persen, dan akan diberikan sampai bulan Desember 2020), biaya yang dialokasikan bertambah 15,2T sehingga menjadi 43,6T.

Pada periode April 2020, di samping program bantuan sosial, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga mengalokasikan sejumlah anggaran untuk program khusus, yaitu: Bantuan sosial sembako bagi 1.3 juta keluarga di DKI Jakarta dan 600 ribu keluarga yang tinggal di Bogor, Depok, Tangerang, serta Bekasi. Anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial khusus sebesar Rp. 3,4T. Bantuan khusus yang lain di luar lima daerah tersebut berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 9 juta KK dengan total anggaran sebesar 16,2 T. Penerima BST adalah mereka yang tidak menerima program reguler dan tidak sebagai penerima PKH. Pada periode Juni, terdapat dua bantuan, yakni: *pertama*, pemberian beras bagi 10 juta penerima program PKH di seluruh Indonesia. Setiap keluarga akan menerima 5 kg beras setiap bulan dan untuk pengiriman pertama akan dikirim dalam tiga bulan (15 kg) terhitung dari Agustus hingga Oktober 2020. *Kedua*, bantuan bagi 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan beras 15 kg selama Agustus sampai Oktober 2020 (Pertiwi, 2020).

Skema penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial terdiri dari: (1) Bantuan PKH, (2) Program Sembako/BPNT, (3) Bantuan Sosial Sembako khusus DKI Jakarta, (4) Sembako untuk Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, (5) Bantuan Sosial Tunai (BST), (6) Bantuan Santunan Kematian, dan (7) Sembako dan makanan yang disiapkan dengan cepat (siap saji) dari Kementerian Sosial bagi warga DKI Jakarta (Batubara, 2020). Program-program tersebut menjadi solusi dalam

mengatasi masalah kemiskinan yang kembali meningkat di tengah pandemi Covid-19 sehingga penduduk dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya (Rosana, 2020). Selain Kementerian Sosial, pemerintah melalui kementerian yang lain juga meluncurkan berbagai program penanggulangan Covid-19 kepada masyarakat berpenghasilan rendah, seperti: Program Kartu Prakerja, program listrik gratis bagi pelanggan listrik 450 *volt ampere* (VA) selama tiga bulan dan bagi pelanggan listrik 900 VA mendapat potongan harga sebesar 50% untuk bulan April hingga Juni (Hidayat, 2020; Taher, 2020).

Terkait sasaran program bantuan sosial di DIY, Biro Pusat Statistik DIY (2020) mencatat, bahwa dari 3.888.288 orang atau penduduk di DIY, sebanyak 475.720 orang atau 12,28% masih hidup di bawah garis kemiskinan. Keluarga miskin yang merupakan sasaran program bantuan sosial ini tersebar di Kabupaten: Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul serta Kota Yogyakarta. Jumlah penerima bantuan sosial sembako di DIY adalah 370.343 KPM, dengan besaran bantuan sebesar Rp.200.000/bulan. Sedangkan jumlah penerima BST adalah 136.520 KPM. BST diperuntukkan bagi keluarga miskin atau rentan terdampak Covid-19 dalam bentuk uang dengan besaran bantuan 600 ribu bagi setiap penerima bantuan selama bulan April sampai Juni dan 300 ribu untuk bulan Juni sampai Desember (Prabawanti, 2020). Apabila dicermati, program bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 cukup melimpah. Pertanyaannya adalah apakah semua responden penelitian, yang merupakan keluarga berpenghasilan rendah dan terdampak Covid-19 bisa mengakses program bantuan sosial tersebut?

Permasalahan yang kadang terjadi dalam skenario pembagian bantuan sosial adalah masalah ketidaktetapan identitas penerima bantuan hingga media pengaduan masalah (Renaldo, 2020). Selain itu, menurut pengamat kebijakan publik Yogi Suprayogi, permasalahan bantuan sosial terletak pada proses penyaluran

bantuan yang tidak meluas dan tidak serempak (Taher, 2020). Lebih lanjut, KPK menemukan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, ditemukan kesemrawutan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang tidak akurat *update* pada beberapa lokasi (Ferdiansyah, 2020). Padahal kebaruan data sangat penting agar penyaluran bantuan sosial dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Poin krusial berdasarkan masalah bantuan sosial tersebut adalah data yang belum di-*update* sehingga keluarga miskin yang mestinya menerima bantuan malahan tidak menerima begitu pun sebaliknya.

Berdasar latar belakang masalah tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa kebijakan pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan sosial merupakan respons cepat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak Covid-19. Menurut BPS (2020), masyarakat berpenghasilan rendah dikategorikan sebagai kelompok miskin, rentan miskin, dan pekerja di sektor informal. Kelompok ini merupakan kelompok yang paling terdampak ketika dihadapkan dengan bencana ekonomi ataupun sosial, termasuk Covid-19. Berkenaan dengan hal itu, sosiolog Jerman, Ulrich Beck (1992) dalam artikelnya *Risk Society: Toward A New Modernity* mengatakan bahwa pada masyarakat modern, kekayaan akan terakumulasi di kelas atas, sebaliknya kerentanan dan risiko akan terakumulasi di kelas bawah. Persentase masyarakat berpenghasilan rendah menurut Hasil Survei Demografis BPS tahun 2020 sebesar 70.53%. Masyarakat berpenghasilan rendah ini mengalami peningkatan pengeluaran sebesar 56% (BPS, 2020), dimana perubahan pengeluaran yang paling dominan adalah kebutuhan dasar pangan. Oleh karena itu, di tengah pandemi Covid-19 pemerintah melalui Kementerian Sosial hadir untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meminimalisir kerentanan atau risiko dalam pemenuhan kebutuhan dasar pangan. Dengan bantuan sosial ini diharapkan dapat terjaga

konsumsi dasar pangan masyarakat dan kestabilan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan asesmen dalam rangka mengidentifikasi apakah keluarga miskin atau berpenghasilan rendah yang masuk DTKS dan rentan terdampak Covid-19 di DIY mendapatkan bantuan sosial yang menjadi haknya, baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19. Asumsi yang mendasari adalah bahwa bantuan sosial yang diterima penduduk miskin sangat bervariasi berdasar preferensi dan reaksi ketika mengalami kenyataan yang sama. Asesmen merupakan suatu tindakan untuk menilai jumlah, nilai, dan kualitas agar dapat membuat keputusan yang adil melalui pengumpulan dan pendiskusian berbagai sumber informasi sehingga memperoleh gambaran tentang kondisi nyata di lapangan (*Dictionary Cambridge*, 2020; Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020; *Westminster College*, 2020). Sejalan dengan itu, Sala et al., (2015) menjelaskan asesmen sebagai metode penilaian kompleks yang dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan dalam konteks lingkungan, ekonomi, dan sosial. Harapannya, asesmen terhadap bantuan sosial dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, seperti yang dikemukakan Boud (2018) asesmen harus sejalan dengan standar sehingga memfokuskan pada sejauh mana keputusan tersebut didukung oleh bukti (Wiliam, 2011). Hal ini membutuhkan pertimbangan yang selaras dengan pedoman sehingga informasi yang didapatkan sesuai dengan bukti yang ada, dalam konteks ini asesmen berhubungan dengan bantuan sosial yang diberikan kepada penduduk miskin.

Dengan dilakukan asesmen bantuan sosial bagi penduduk miskin diharapkan dapat diperoleh informasi seberapa banyak responden di DIY mendapatkan bantuan sosial yang menjadi haknya. Di samping itu juga dapat diidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mengakses bantuan sosial. Hasil asesmen ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan

melakukan inovasi terkait penyaluran bantuan sosial kepada keluarga miskin dan kelompok rentan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian evaluasi, dengan menggunakan metode campuran atau *mix methods*. Creswell & Creswell (2018) dan Timans et al., (2019) menjelaskan *mix-methods* merupakan penelitian dengan mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Jenis *mix methods* yang digunakan adalah paralel konvergen, dimana pengumpulan data kuantitatif maupun kualitatif dilakukan secara bersamaan, kemudian diinterpretasikan secara keseluruhan sehingga diperoleh data yang holistik, sah, andal, dan rasional (Creswell & Creswell, 2018; Gajaweera & Johnson, 2015; Sugiyono, 2014). Interpretasi data kualitatif menerangkan apa yang didapatkan dari analisis kuantitatif. Alasan menggunakan *mix methods* agar ditemukan hasil riset yang holistik, daripada menggunakan satu metode saja.

Penelitian ini dilaksanakan di DIY, yang terdiri dari empat Kabupaten (Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul), dan 1 Kota (Yogyakarta). Kelima lokasi penelitian ini terpapar pandemi Covid-19 dan terdapat keluarga miskin dan rentan yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan.

Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga miskin (berpenghasilan rendah) dan kelompok rentan yang terpapar Covid-19 di DIY. Sampel penelitian diambil secara *purposive*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menetapkan kriteria (Sugiyono (2014a). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Keluarga Miskin/berpenghasilan rendah, 2) Memiliki Identitas KPT/KK, dan 3) Terdampak Covid-19. Untuk kepentingan analisis setiap lokasi diambil 30 responden sebagai sampel, yang diambil dengan acak atau random. Dengan demikian, kegiatan penelitian ini melibatkan 150 responden. Untuk memperkuat hasil

analisis dilakukan *in depth interview* terhadap 15 responden dari lima lokasi penelitian. Adapun pengumpulan data dilaksanakan dua kali, yakni saat awal masuknya Covid-19 (Maret sampai Juni 2020) dan saat Covid-19 berlangsung (Desember 2020). Dengan melakukan pengumpulan data dua kali terhadap responden yang sama dalam periode yang berbeda diharapkan dapat diperoleh informasi tentang tingkat keterjangkauan bantuan sosial bagi keluarga miskin yang kondisinya semakin terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari angket dan wawancara. Angket, berupa daftar pernyataan tertulis terdiri dari 20 butir soal untuk menggali bantuan sosial yang diterima keluarga miskin dan rentan terdampak Covid-19. Sedangkan wawancara mendalam semi terstruktur dilakukan guna menggali data kualitatif terkait masalah penelitian. Mengingat situasi pandemi Covid-19, peneliti melibatkan dua enumerator lokal di setiap lokasi. Data kuantitatif diolah menggunakan statistik deskriptif, untuk menggambarkan sasaran penelitian dan asesmen bantuan sosial, kemudian dilakukan pengategorian (Azwar, 2017). Sementara data kualitatif secara naratif diberi makna dengan cara mereduksi data (pemilihan, pemusatan, penyederhanaan dan abstraksi data mentah) sesuai dengan tujuan penelitian. Rangkaian analisis data kualitatif diproses selama pengumpulan data (saat dan setelah) dengan merujuk pada analisis data kualitatif model Miles & Huberman (1994).

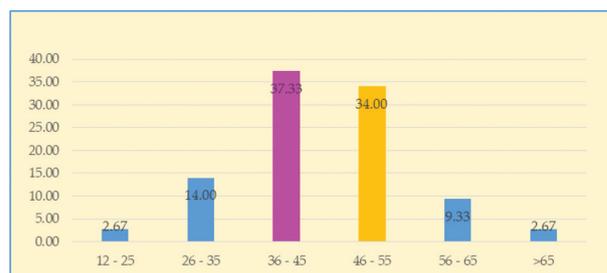
## Hasil dan Pembahasan

### Deskripsi Responden Penelitian

**Berdasar data jenis kelamin**, sebagian besar responden (58%) adalah laki-laki, dan selebihnya 42% adalah perempuan. Besarnya persentase responden berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan, terkait erat dengan budaya patriarki yang masih kuat di lokasi penelitian, dimana budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga, bertanggung jawab mencukupi kebutuhan

seluruh anggota keluarga. Masyarakat di lokasi penelitian cenderung masih mempersepsikan bahwa posisi yang sesuai bagi perempuan adalah di rumah. Sementara laki-laki berperan sebagai kepala keluarga, wajib mencari nafkah demi menghidupi seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, setiap perempuan yang bekerja di luar rumah mudah mengalami konflik dalam bekerja daripada laki-laki.

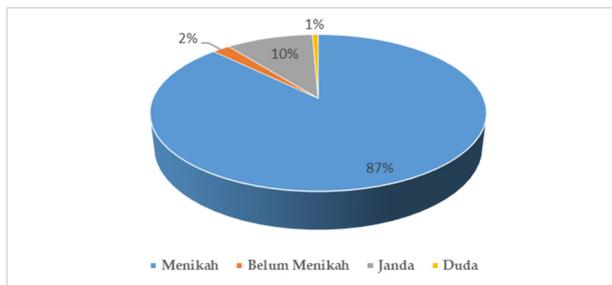
**Berdasar usia**, mayoritas responden (71,33%) berusia antara 36-55 tahun. Kelompok usia ini merupakan kelompok usia produktif. Data ini dapat dimaknai bahwa sebagian besar KPM penerima bantuan sosial berada pada usia produktif. Pada kelompok usia ini seseorang sudah matang dalam berfikir, bersikap dan bertindak sehingga selalu mengupayakan adanya keseimbangan antara kerja dan mengelola kehidupan keluarga. Distribusi responden berdasar umur tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1  
Responden berdasar Kelompok Usia (%)  
Sumber: (Hasil Analisis, 2021)

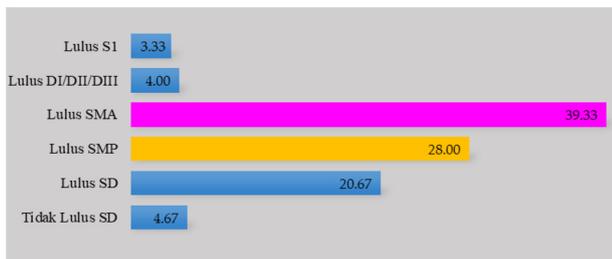
**Berdasar status perkawinan**, mayoritas responden (87%) berstatus kawin. Status perkawinan berdasar BPS, bukan saja pasangan yang kawin secara hukum (adat, agama, dan negara), tetapi juga bagi pasangan yang sudah hidup dalam satu atap dan dianggap masyarakat sebagai pasangan. Secara umum masyarakat melihat bahwa status kawin berkorelasi secara signifikan seraya fungsi dan kewajiban baru yang mengikat pasangan suami istri dalam hidup berumah tangga. Di samping itu, pasangan suami istri harus menjalankan fungsi sebagai ayah dan ibu ketika memiliki anak. Dengan demikian, sebagai kepala keluarga, suami wajib

mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Distribusi responden berdasar status perkawinan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2  
Responden Berdasar Status Perkawinan  
Sumber: (Hasil Analisis, 2021)

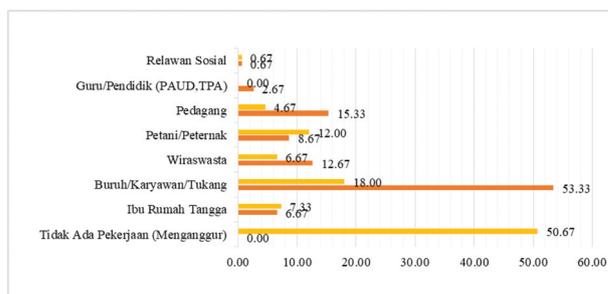
**Berdasarkan pendidikan yang di tamatkan**, mayoritas responden (67,33%) berpendidikan menengah, yaitu SMA (39,33%) dan SMP (28%). Merujuk data tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebagian besar responden mempunyai kapasitas/kualitas SDM yang cukup memadai. Diharapkan dengan pendidikan yang dimilikinya ini, responden bisa memiliki pemahaman yang baik terkait Covid-19 serta kebijakan dari pemerintah, sehingga dapat merespons kebijakan yang ada secara positif. Distribusi responden berdasarkan pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3  
Responden Berdasar Pendidikan yang Ditamatkan (%)  
Sumber: (Hasil Analisis, 2021)

**Berdasar pekerjaan**, 95,33% responden menyatakan ada dampak yang signifikan antara Covid-19 yang terjadi dengan pekerjaan yang ditekuni. Sebelum pandemi Covid-19 melanda,

mayoritas responden (53,33%) bekerja sebagai buruh/karyawan, dan mayoritas kedua sebagai pedagang (15,33%). Berdasar data pada Gambar 4 disimpulkan, bahwa sebagian besar responden bekerja pada sektor informal. Pada masa pandemi Covid-19, mayoritas responden (50,67%) kehilangan pekerjaan dan menganggur. Angka pengangguran ini diperoleh dari akumulasi pekerjaan responden di sektor informal sebagai buruh/karyawan, pedagang, dan wiraswasta. Satu-satunya sektor yang mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 adalah pertanian/peternakan (terjadi kenaikan 3,33%). Deskripsi responden berdasar pekerjaan yang ditekuni awal dan saat Covid 19 berlangsung dapat dilihat pada Gambar. 4



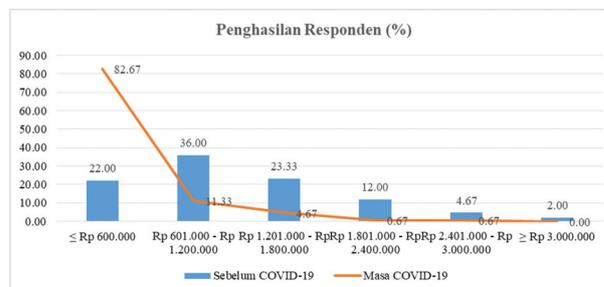
Gambar 4  
Responden Berdasar Pekerjaan (%)  
Sumber: (Hasil Analisis, 2021)

Data pada Gambar 4 menunjukkan, bahwa ada akumulasi pengangguran sebesar 50,67% pada responden penelitian, padahal sebelum pandemi Covid-19 persentase pengangguran tidak ditemukan. Pengangguran ini berasal dari responden yang mengalami PHK, pedagang dan wiraswasta yang tidak bisa melanjutkan usahanya akibat Covid-19 dan angkatan kerja baru yang tidak terserap pada lapangan kerja. Responden terdampak Covid-19 sebagian bertahan di sektor informal untuk menopang kehidupannya yang semakin terpuruk, sebagian lagi masuk ke sektor primer (pertanian) yang sebelumnya tidak pernah dilirik dan sebagian yang lain mengandalkan bantuan sosial pangan untuk mempertahankan diri menghadapi pandemi Covid-19.

Beberapa ungkapan informan semakin menguatkan perubahan yang dialaminya akibat Covid-19: *“selama pandemi corona tempat saya bekerja libur sehingga saya tidak bisa bekerja lagi dan menjadi pengangguran”* (Sam, KP, 9 Mei 2020); *“tidak ada pemasukan, benar-benar prihatin karena setelah corona angkringan tempat bekerja tidak jualan, otomatis saya diberhentikan. Sekarang usaha titip makanan kecil tapi tidak begitu laku, susah penjualannya”* (Prih, Btl, 19 April 2020); *“ekonomi keluarga tidak bisa dijalankan karena usaha laundry saya tidak bisa jalan, jadi hanya bergantung pada tetangga sekitar yang butuh jasa laundry dan tabungan yang ngga seberapa”* (Win, SIm, 5 Mei 2020); *“kebijakan libur siswa dan mahasiswa sangat membuat sepi orderan bagi driver online seperti saya”* (Mar, Ygy, 25 Mei 2020); *“sekarang saya tidak bisa bekerja seperti biasa, untuk menyambung hidup sekarang saya bertani”* (Ngat, GK, 13 Mei 2020).

**Penghasilan responden** merupakan akumulasi dari penghasilan suami/istri/anak dan penghasilan dari sumber lain selama satu bulan. Menurut hasil penelitian, penghasilan terendah responden per bulan sebelum pandemi Covid-19 adalah Rp 300.000 dan Rp 10.500.000 sebagai penghasilan tertinggi dan rata-rata Rp 1.981.988. Sedangkan penghasilan terendah responden per bulan pada masa pandemi Covid-19 adalah Rp 0 (tidak ada penghasilan), tertinggi Rp 3.250.000 dan rata-rata Rp 668.958. Apabila penghasilan responden ini dibandingkan dengan upah minimum provinsi (UMP) di DIY tahun 2020 (sebesar Rp 1.704.608) maka sebelum pandemi Covid-19 tercatat 70 responden (46,67%) memiliki penghasilan di bawah UMP. Pada masa pandemi Covid-19 tercatat 138 responden (92%) memiliki penghasilan di bawah UMP. Apabila kondisi penghasilan responden sebelum dan setelah Covid-19 dibandingkan maka terjadi penambahan sekitar 97,14% responden dengan penghasilan di bawah UMP Provinsi DIY.

Penghasilan rata-rata yang diperoleh responden per bulan sebelum dan pada masa COVID-19 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 5  
Responden Berdasar Rata-rata Penghasilan yang Didapat Setiap Bulan  
Sumber: (Hasil Analisis, 2021)

**Berdasarkan jumlah anak yang dimiliki**, mayoritas responden (63,33%) memiliki anak antara 1-2 orang. Sedangkan berdasar jumlah jiwa yang ditanggung, mayoritas responden (52%) memiliki tanggungan antara 3-4 orang. Adapun jumlah anggota keluarga adalah semua keluarga (jumlah jiwa) sebagai tanggungan suatu rumah tangga. Dengan demikian, apabila dalam suatu keluarga dengan satu atap terdapat saudara kandung atau saudara bukan kandung yang dalam kondisi belum kerja, tetapi hidup bersama maka dimasukkan sebagai tanggungan dari rumah tangga tersebut. Dengan menyimak data jumlah anak dan jumlah tanggungan keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menganut pola keluarga inti, dimana keluarga yang dibangun terdiri dari suami-istri dan anak 1-2 orang.

### Asesmen Bantuan Sosial yang Diterima Responden pada Awal Pandemi COVID-19

Bantuan sosial dari pemerintah kepada keluarga miskin dan rentan terus bergulir. Adanya bantuan sosial membuat keluarga miskin dan rentan mampu bertahan di tengah ancaman global Covid-19. Penelitian ini menggali seberapa besar keluarga miskin dan rentan dapat mengakses bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah dan menjadi

haknya. Aksesibilitas program dapat dilihat dengan menghitung jumlah ideal keluarga miskin dan rentan yang semestinya menerima bantuan sosial karena memenuhi persyaratan yang ditentukan dan membandingkannya dengan jumlah riil penerima bantuan.

Angket asesmen bantuan sosial ini menggunakan pilihan jawaban yang terdiri dari tanggapan ya dan tidak. Berdasar hasil penelitian, hingga periode 31 Mei 2020 (saat penelitian ini dilakukan), hanya 48% responden penelitian yang menjawab ya. Artinya, hanya 72 responden mendapat program bantuan sosial dari pemerintah. Selebihnya, 52% responden menyatakan belum pernah menerima bantuan sosial dalam bentuk apapun dari pemerintah,

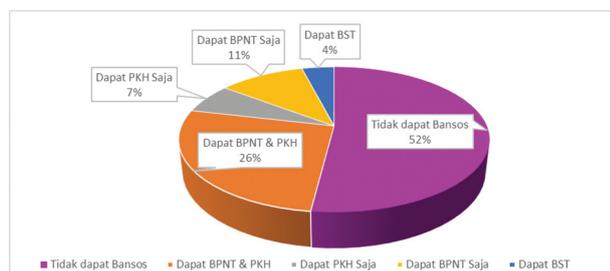
baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19. Kenyataan ini memberi makna bahwa program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah pada awal pandemi Covid-19 belum mampu menyentuh semua sasaran yang berhak menerima di DIY. Hal ini terkait dari banyak hal, seperti sasaran yang belum terdata, minimnya sosialisasi program, kurang siapnya petugas melakukan pembaharuan data dan berbagai alasan lainnya. Fenomena ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, mengingat responden adalah mereka yang berhak atas berbagai bantuan sosial tersebut. Distribusi responden berdasar bantuan sosial yang diterima dapat digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1  
Distribusi Responden Berdasar Penerimaan Program Bansos (Per Mei 2020, N=72)

No	Nama Program	Jumlah Penerima Bantuan	Tahun Program	Besar Bantuan/Bulan
1	PKH & BPNT/Sembako	40 KPM	2008-2020	PKH: Rp 75.000 s.d Rp 600.000 BPNT/Sembako: Rp 110.000 s.d Rp. 200.000
2	PKH Saja	10 KPM	2008-2020	Rp 75.000 s.d Rp 600.000
3	BPNT Saja	16 KPM	2017-2020	Rp 110.000 s.d Rp 200.000
4	BST	6 KPM	2020	Rp 600.000

\*Sumber: Analisa data primer, 2020

Komposisi responden berdasar penerimaan bantuan sosial dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6  
Responden Berdasar Penerimaan Bantuan Sosial  
Sumber: (Hasil Analisis, 2021)

Data pada Gambar 6 menunjukkan bahwa separuh lebih responden penelitian tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, meskipun secara riil mereka adalah keluarga

miskin dan rentan. Menurut hasil wawancara terhadap sejumlah responden penerima bantuan, diperoleh informasi bahwa besarnya bantuan PKH variatif, sesuai komponen. Sementara besar bantuan sosial yang diterima responden juga sudah sesuai aturan bantuan sembako senilai Rp.200.000/bulan, dan BST sebesar Rp. 600.000/bulan. Bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban responden dalam pemenuhan kebutuhan dasar pangan.

Terkait kurang meratanya bantuan sosial, informan menyatakan sebagai berikut. “*Sebenarnya program bantuan sosial sudah sesuai dan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok, hanya saja masih banyak yang kelewatan tidak dapat bantuan, meskipun kondisinya miskin*” (Mun,

Slm, 30 April 2020). *“Selama masa pandemi Covid-19, banyak keluarga kehilangan mata pencaharian dan pendapatan menurun. Kebijakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial saya pikir tepat, namun bantuan tersebut belum menyentuh semua masyarakat miskin/terdampak Covid-19”* (Par, Btl, 14 April 2020). *“Bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah kurang merata, banyak masyarakat yang terdampak langsung dan kurang mampu namun belum mendapat bantuan”* (Dar, GK, 10 Mei 2020).

### Nilai Kebermanfaatan dan Kualitas Bantuan Sosial yang Diterima Responden

Sebagian besar informan mengakui bahwa bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 sangat dirasakan mereka yang terdampak, tetapi tidak semua keluarga miskin mengetahui mekanisme untuk mengakses bantuan sebagaimana disampaikan informan berikut. *“Saya belum pernah mendapatkan bantuan sosial, meskipun kondisi kehidupan keluarga saya sangat memprihatinkan. Di samping tidak tahu informasi terkait bantuan sosial tersebut, saya juga tidak tahu bagaimana cara memperoleh bantuan”* (Mul, Yog, 22 Mei 2020). *“Tidak semua masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan karena tidak terdata atau tidak tahu bagaimana cara mendapatkan bantuan”* (Pen, GK, 13 Mei 2020). Bahkan ungkapan emosional sempat terlontar dari salah satu informan yang merasa kesal dengan adanya bantuan sosial yang datang terus menerus pada salah satu warga, sementara warga yang lain tidak dapat bantuan sama sekali. *“Menurut saya, terjadi salah sasaran bantuan. Terkadang yang sudah mendapat bantuan mendapat terus, tetapi yang seharusnya mendapat malah tidak dapat. Saya sendiri belum bisa mengakses bantuan apapun, padahal bantuan tersebut sangat membantu kami karena tidak punya penghasilan tetap”* (Mam, KP, 17 Mei 2020).

Terkait tanggapan responden terhadap nilai kemanfaatan bantuan sosial yang diterima,

dari 150 responden yang diteliti, hanya 117 responden (78%) yang memberikan jawaban sebagaimana tersaji dalam tabel 2.

Tabel 2  
Nilai Kebermanfaatan Bantuan Sosial yang Diterima Responden

No	Tanggapan Responden terhadap Bansos	Frekuensi	%
1	Biasa Saja	8	5,33
2	Bermanfaat	31	20,67
3	Sangat Bermanfaat	78	52
4	Tidak Menjawab	33	22
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

\*Sumber: Analisa Data Primer, 2020

Data pada Tabel 2, dari 150 responden yang memberikan tanggapan, 72,67% menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima dari pemerintah pada masa Covid-19 sangat bermanfaat (52%) dan bermanfaat (20,67%). Menurut responden, bantuan sosial yang diterima memiliki nilai kebermanfaatan yang sangat besar karena responden dan keluarga sangat terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan dalam mempertahankan hidup di tengah pandemi Covid-19, sebagaimana diungkapkan informan penelitian: *“Dengan adanya bantuan sosial ini, masyarakat yang tidak mampu dan terdampak Covid-19 terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok”* (Nin, KP, 23 April 2020); *“Kami berterima kasih kepada pemerintah karena memberi bantuan sosial sehingga kami bisa makan dan bertahan dalam menghadapi Covid-19”* (Mun, Slm, 30 Mei 2020). Dengan demikian, bantuan sosial yang diberikan pemerintah dinilai dapat menjadi solusi bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk dapat bertahan hidup di masa pandemi COVID-19.

Terkait indeks bantuan sosial responden menyatakan, bahwa bantuan sosial berupa sembako yang diterima index bantuan lebih besar (Rp. 200.000) di dibandingkan BPNT (Rp. 110.000) dan bisa dimanfaatkan untuk membeli sembako dengan varian yang lebih baik dan

lengkap. Pada program BPNT, bantuan hanya bisa dicairkan dan dibelanjakan beras dan telur. Sedangkan pada bantuan sosial sembako ada penambahan komoditi berupa karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral. Dari aspek kualitas, kandungan gizi yang ada pada bantuan sosial sembako lebih lengkap dibandingkan BPNT yang hanya berupa karbohidrat (beras) dan protein (telur).

Tanggapan responden terkait kualitas bantuan sosial yang diterimanya: *“Bantuan sosial sembako yang kami terima lebih bervariasi dan kualitasnya baik”* (Man, Slm, 13 Des 2020). *“Alhamdulillah bantuan sosial sembako yang kami terima nilainya lebih besar dan bisa dibelanjakan untuk kebutuhan hidup yang lebih lengkap, tidak hanya beras dan telur seperti dulu.”* (Par, Btl, 14 Desember 2020). Dengan jumlah bantuan sosial yang lebih besar dan komoditas yang lebih lengkap maka responden terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih bergizi selama pandemic Covid-19. Hal ini penting untuk memperkuat daya tahan tubuh responden agar tidak terpapar Covid-19.

#### **Asesmen Bantuan Sosial bagi Responden pada Masa Pandemi Covid-19 (Desember 2020)**

Pada bulan Juli 2020 hasil penelitian ini telah diseminarkan dengan mengundang pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait. Sebagian aparat Pemerintah Daerah dan pihak terkait membenarkan bahwa kondisi pada masa awal Pandemi Covid-19 memang agak kacau. Artinya, masih terdapat keluarga miskin yang belum bisa mengakses bantuan karena tidak terdata atau sudah terdata dan diajukan ke pusat, tetapi nama-nama penerima bantuan yang muncul masih nama-nama lama, seakan-akan belum dilakukan verifikasi dan validasi data. Aparat bekerja sama dengan pendamping dan petugas terus melakukan pendataan dan mengusulkan bantuan ke pusat (Bansos pusat dengan anggaran APBN) atau ke daerah (Bansos

dengan anggaran APBD), bahkan mengajukan ke desa (dengan anggaran Dana Desa).

Pada akhir Desember 2020, dengan menggunakan instrumen penelitian yang sama, peneliti menggali informasi dari responden yang pada asesmen awal belum mendapatkan bantuan sosial (78 orang). Berdasar hasil asesmen kedua diperoleh data, bahwa semua responden telah mendapatkan bantuan sosial. Bantuan tersebut berasal dari APBN (Kementerian Sosial), APBD (Pemda) dan anggaran desa. Adapun mekanisme yang ditempuh responden untuk mendapatkan bantuan, ada yang berasal dari inisiatif responden dan ada juga yang dari inisiatif petugas sebagaimana disampaikan responden sebagai berikut. *“Tadinya saya diam ketika tidak mendapatkan bantuan sosial karena yang hidupnya lebih susah dari saya jumlahnya banyak dan mereka lebih membutuhkan. Namun, pada bulan Juni akhir, saya hanya dapat jatah bekerja seminggu 2-3 kali dan penghasilan saya menurun drastis. Jadi, saya merasa perlu mencari informasi bagaimana cara mendapat bantuan, kemudian saya mendatangi Dinas Sosial setempat tetapi disarankan untuk melapor ke RT, desa atau melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan setempat agar didata. Setelah melapor dan mengikuti prosedur yang ditentukan akhirnya mulai September keluarga kami dapat bantuan sosial, alhamdulillah”* (Pen, GK, 10 Des 2020). *“Alhamdulillah, tidak lama setelah ada penelitian, sekitar Juli akhir petugas datang melakukan pendataan dan sejak bulan September kami mendapatkan bantuan sosial berupa sembako”*. (Mul, Yog, 5 Des 2020); *“Awal Juli 2020 kami didatangi petugas, ditanya-tanya dan mulai Oktober keluarga kami mendapat bantuan sosial, alhamdulillah sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan pangan”* (Mam, KP, 7 Desember 2020). Testimoni dari beberapa informan ini menunjukkan kesungguhan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait di DIY dalam mengawal dan menyalurkan bantuan sosial sehingga bantuan tersebut tepat sasaran.

Terkait jumlah bantuan sosial yang diterima responden menyatakan bahwa bantuan yang diterima jumlahnya sudah sesuai dan kualitasnya juga baik. Kualitas dalam hal ini menyangkut kesesuaian antara jenis bantuan sosial dengan kebutuhan responden atau tingkat baik buruknya bantuan sosial menurut persepsi responden. Dengan jumlah bantuan sosial yang sesuai dan kualitas yang baik maka hak-hak responden untuk mendapat layanan sosial dasar berupa pangan telah terpenuhi.

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi telah mempengaruhi secara signifikan berbagai sektor kehidupan. Kelompok yang paling merasakan dampak Covid-19 ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan, pandemi Covid-19 di DIY berdampak signifikan pada pekerjaan dan penghasilan responden. Sebanyak 50,67% responden menyatakan kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran sejak pandemi Covid-19. Hal ini relevan dengan data BPS (2020) yang menyebutkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kelompok yang paling terdampak ketika dihadapkan dengan bencana ekonomi ataupun sosial, termasuk Covid-19. Temuan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah adalah kelompok paling rentan terdampak Covid-19 ini relevan dengan pendapat Ulrich Beck (1992) yang menyatakan bahwa kekayaan akan terakumulasi di kelas atas, sebaliknya kerentanan dan risiko (termasuk risiko terdampak Covid-19) akan terakumulasi di kelas bawah.

Dari aspek penghasilan, sebelum pandemi COVID-19 melanda, tercatat 46,67% responden memiliki penghasilan di bawah UMP DIY. Pada masa pandemi Covid-19 tercatat 92% responden memiliki penghasilan di bawah UMP. Penurunan penghasilan responden ini berpengaruh terhadap pengeluaran. Modjo (2020), menjelaskan bahwa, menurunnya tingkat konsumsi belanja rumah tangga disebabkan karena dua hal, yakni (1) jumlah pengangguran yang meningkat sehingga memberi dampak langsung terhadap

penurunan belanja akibat pendapatan yang menurun, dan (2) meningkatnya ketidakpastian karena hantaman pandemi Covid-19 sehingga tabungan yang oleh rumah tangga dialihkan bagi mereka yang pendapatan belum terdampak krisis akibat pandemi ini.

Dalam rangka merespons pandemi Covid-19 yang terjadi, pemerintah mengucurkan berbagai program bantuan sosial, baik berupa uang tunai, sembako, keringanan tarif listrik, dan kebutuhan lainnya. Tujuan dari pemberian bantuan sosial adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar pangan, menjaga daya beli, dan mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan. Kelompok rentan menurut (Bagus, 2020) adalah pekerja yang dalam jam berkerja, kontrak, lingkup dan jaminan tidak menentu. Banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja menjadikan penambahan jumlah keluarga miskin. Sebelum adanya pandemi Covid-19, Sebagian keluarga miskin telah mendapat bantuan sosial berupa PKH, Rastra dan BPNT. Sejak pandemi Covid-19, pemerintah di samping mengeluarkan bantuan sosial yang bersifat reguler, juga mengeluarkan bantuan sosial khusus bagi pekerja informal yang mengalami penurunan penghasilan secara masif akibat berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Keluarga miskin kian bertambah karena sebagian besar perusahaan memutus hubungan kerja, yang berakibat terhadap menurunnya kemampuan daya beli mereka guna memenuhi kebutuhan setiap hari (Probosiwi & Putri, 2021).

Penelitian ini bertujuan melakukan asesmen terkait jumlah, nilai, dan kualitas bantuan sosial dalam rangka mengidentifikasi apakah kelompok miskin dan rentan di DIY mendapatkan haknya atau tidak. Hasil asesmen awal menunjukkan, bahwa jumlah penerima bantuan sosial sebelum dan pada awal pandemi Covid-19 sebesar 50,2 persen. Ini berarti bantuan sosial yang digulirkan pemerintah belum mampu menyentuh semua responden. Bagi responden yang menerima bantuan sosial, mayoritas menyatakan bahwa jumlah bantuan

sosial yang diterima sesuai dengan ketentuan, dengan kualitas baik dan memiliki nilai kemanfaatan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Namun demikian, hal ini hanya dirasakan oleh sebagian responden saja. Ditemukan beberapa alasan responden belum menerima bantuan sosial, di antaranya: tidak terdata, tidak memiliki informasi yang cukup terkait program bantuan sosial, dan tidak tahu cara mengakses bantuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa data yang menjadi dasar dalam penentuan kebijakan penyaluran bantuan sosial kurang akurat atau kurang valid sehingga berpotensi tidak sesuai target pemerintah. Mereka yang mestinya tidak berhak mendapat bantuan justru mendapat bantuan, sebaliknya yang berhak mendapat bantuan sosial tidak mendapat karena tidak terdata atau terdata, tetapi belum divalidasi sehingga data yang digunakan sebagai acuan adalah data lama yang tidak lagi relevan karena sebagian nama sudah pindah atau bahkan meninggal dunia. Hasil penelitian ini relevan dengan temuan Hidayat (2020); Jingga (2020), dan Renaldo (2020), yang menyatakan bahwa masalah klasik yang terjadi dalam skenario pembagian bantuan sosial menyangkut keakuratan data; penyaluran bantuan yang tidak merata; dan kesemrawutan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Dengan advokasi dan rekomendasi hasil riset awal yang dilakukan, Pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait merespon dengan melakukan pendataan ulang sehingga pada akhir 2020 semua responden bisa mengakses bantuan sosial dengan kualitas yang baik. Terkait nilai kemanfaatan bantuan sosial, mayoritas responden merasa bantuan sosial yang diterima sangat bermanfaat karena dapat menopang kebutuhan pangan keluarga di masa pandemi Covid-19. Dengan bantuan sosial tersebut, responden mampu memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi sehingga dapat bertahan pada masa sulit akibat pandemic Covid-19. Memang, bantuan sosial tersebut belum mampu mengcover semua kebutuhan pangan yang dirasakan responden, tetapi setidaknya

bantuan sosial tersebut dapat mengurangi beban keluarga miskin yang semakin berat akibat pandemi Covid-19.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah untuk menanggulangi keluarga miskin terdampak Covid-19 di DIY pada asesmen awal belum merata. Tidak meratanya bantuan sosial ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti: data yang menjadi dasar penentuan sasaran kurang akurat sehingga berpotensi tidak tepat sasaran. Di samping itu, masyarakat juga kurang mendapatkan sosialisasi dan edukasi yang cukup terkait program bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 sehingga tidak tahu bagaimana cara mengakses bantuan sosial. Dari pihak aparat pemerintah dan petugas terkait menyatakan bahwa memang ada beberapa keluarga miskin yang terlewat dalam pendataan. Namun, secara umum verifikasi dan validasi data sudah dilakukan sesuai mekanisme yang ditentukan dan nama calon penerima manfaat sudah diajukan, tetapi nama yang ke luar ternyata sama seperti sebelum dilakukan updating data, berarti ada masalah dalam aplikasi data. Permasalahan ini sering memicu terjadinya konflik sosial pada masyarakat bawah. Bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah ini terbukti sebagai solusi bagi keluarga miskin/terdampak Covid-19 dalam mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan pangan. Responden menyatakan bantuan sosial yang diterima sesuai dalam jumlah dan dengan kualitas yang baik sehingga dapat dijadikan penopang hidup di saat responden tidak memiliki sumber mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja dan atau terjadi penurunan penghasilan yang sangat signifikan akibat Covid-19. Pada asesmen kedua, keluarga miskin terdampak Covid-19 telah mendapat bantuan sosial yang menjadi haknya, baik karena mengajukan kepada pihak yang berwenang, didatangi petugas untuk didata atau diusulkan pihak yang

lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat ataupun daerah berupaya secara optimal dalam penanganan Covid-19, terutama dalam pemenuhan bantuan sosial bagi keluarga miskin terdampak Covid-19.

### Rekomendasi

Bertitik tolak dari temuan penelitian bahwa data yang valid dan akurat merupakan hal yang urgen dalam penyaluran bantuan sosial maka beberapa rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Perlu dilakukan validasi dan verifikasi serta konfirmasi data secara berkala di daerah dan disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial sehingga data yang menjadi dasar penentuan kebijakan valid dan keluarga miskin/berpenghasilan rendah/terdampak Covid-19 dapat mengakses bantuan sosial atau pelayanan sosial yang menjadi haknya, (2) Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi program bantuan sosial secara berkelanjutan sehingga memudahkan masyarakat miskin dan rentan untuk mengakses bantuan sosial yang dibutuhkan, (3) Perlu diciptakan sinergitas program dan sinergitas lintas sektoral dari pusat hingga daerah dalam penanganan masyarakat miskin/terdampak Covid-19, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelayanan dan program bantuan sosial efektif dan efisien, (4) Perlu dikembangkan program-program pemberdayaan sosial ekonomi berbasis komunitas dengan melibatkan unsur pemerintah, organisasi non pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil guna mewujudkan ketahanan pangan dan sosial bagi keluarga miskin/terdampak Covid-19 dan menguatkan sosial *capital* di dalam masyarakat.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah di DIY, khususnya Dinas Sosial dan *stakeholder* atas bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga kegiatan penelitian ini terselesaikan dengan baik. Terima kasih juga, kami sampaikan kepada enumerator lokal, perangkat desa, pendamping

sosial dan responden/informan penelitian atas segenap data yang diberikan.

### Pustaka Acuan

- Anand, K. B., Karade, S., Sen, S., & Gupta, R. M. (2020). SARS-CoV-2: Camazotz's Curse. *Medical Journal Armed Forces India*, 76(2), 136–141. <https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2020.04.008>
- Asian Development Bank. (2020). *Social Assistance*. <https://www.adb.org/themes/social-development/social-protection/social-assistance>
- Azwar, S. (2017). *Reliabilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar.
- Bagus, A. P. dkk. (2020). Melindungi Pekerja rentan masa dan pasca pandemi. In *IGPA & Forbil Institute Institute* (Vol. 53, Issue 9).
- Baig, A. M. (2020). Neurological manifestations in COVID-19 caused by SARS-CoV-2. *CNS Neuroscience and Therapeutics*, 26(5), 499–501. <https://doi.org/10.1111/cns.13372>
- Bao, L., Deng, W., Huang, B., Gao, H., Liu, J., Ren, L., Wei, Q., Yu, P., Xu, Y., Qi, F., Qu, Y., Li, F., Lv, Q., Wang, W., Xue, J., Gong, S., Liu, M., Wang, G., Wang, S., ... Qin, C. (2020). The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice. *Nature*, 583(7818), 830–833. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2312-y>
- Batubara, P. J. (2020). *Bantuan "Social Safety Net" Kementerian Sosial bagi Keluarga Miskin dan Rentan terdampak Covid-19*. <https://www.kemsos.go.id/>
- Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. Sage Publications Ltd.
- Béland, D., & Daigneault, P. (Eds.). (2015). *Welfare Reform in Canada: Provincial Social Assistance in Comparative Perspective*. University of Toronto Press. <https://doi.org/doi:10.3138/j.ctv1005dhc>
- Boud, D. (2018). Assessment could demonstrate learning gains, but what is required for it to do so? *Higher Education Pedagogies*, 3(1), 54–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23752696.2017.1413671>
- BPS. (2020). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>
- Cooper, M. G., Karu, A. W., & Bowden, C. D. (2020). COVID-19 and global health: Influences and implications for education and training support in low- and middle-income countries. *Anaesthesia and Intensive Care*, 48(4), 262–265. <https://doi.org/10.1177/0310057X20949549>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.

- Dictionary Cambridge. (2020). *assessment*. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/assessment>
- Ferdiansyah, B. (2020). KPK masih temukan kesemrawutan penyaluran bansos. *Antaranews.Com*.
- Gajaweera, N., & Johnson, A. (2015). *What are the guidelines for objective, reliable and valid research?* <https://crcc.usc.edu/report/studying-faith-qualitative-methodologies-for-studying-religious-communities/what-are-the-guidelines-for-objective-reliable-and-valid-research/>
- Hidayat, R. (2020, April 8). *Program Jaring Pengaman Sosial Jokowi Cuma Gimik di Tengah COVID-19*. <https://tirto.id/program-jaring-pengaman-sosial-jokowi-cuma-gimik-di-tengah-covid-19-eLNr>
- Jingga, R. P. A. (2020). *Pemerintah evaluasi prosedur penyaluran bantuan sosial*. <https://www.antaranews.com/berita/1500440/pemerintah-evaluasi-prosedur-penyaluran-bantuan-sosial>
- Jubba, H. (2021). Beradaptasi dengan Bencana: Strategi Beribadah Umat Islam dan Kristen di Tengah Pandemi Covid-19. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.11164>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2020). *asesmen*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asesmen>
- Loey, M., Manogaran, G., Hamed, M., & Taha, N. (2021). Fighting against COVID-19: A novel deep learning model based on YOLO-v2 with ResNet-50 for medical face mask detection. *Sustainable Cities and Society*, 65(January).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis*. Sage Publications Ltd.
- Modjo, I. M. (2020). Mapping the Road to Strengthen the Economy Post Pandemic. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 103–116. <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i4.342>
- Norton, A., Seddon, N., Agrawal, A., Shakya, C., Kaur, N., & Porras, I. (2020). Harnessing employment-based social assistance programmes to scale up nature-based climate action. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 375. <https://doi.org/10.1098/rstb.2019.0127>
- Odrizola-González, P., Planchuelo-Gómez, Á., Iruiria, M. J., & de Luis-García, R. (2020). Psychological effects of the COVID-19 outbreak and lockdown among students and workers of a Spanish university. *Psychiatry Research*, 290, 113108. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113108>
- Pertiwi, S. W. P. (2020). Menteri Sosial: Bansos Cukup Tepat Sasaran. <https://mediaindonesia.com>. sumber: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/353144/mentero-sosial-bansos-cukup-tepat-sasaran>
- Prabawanti, M. A. H. (2020). Kemensos Terus Gulirkan Bantuan, 136.520 KPM di DIY Terima BST. <https://nasional.kompas.com>. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/20/07474441/kemensos-terus-gulirkan-bantuan-136520-kpm-di-diy-terima-bst>
- Probosiwi, R., & Putri, A. L. (2021). Jogo Tonggo : Solidaritas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19. *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosia*, Vol 10(02), 177–192.
- Renaldo, H. (2020). *Bantuan Pemerintah di Masa Covid-19*.
- Rosana, C. F. (2020). *Bansos, Langkah Jokowi Selamatkan Wong Cilik dari Dampak Corona*. [https://fokus tempo.co/read/1323849/bansos-langkah-jokowi-selamatkan-wong-cilik-dari-dampak-corona?page\\_num=4](https://fokus tempo.co/read/1323849/bansos-langkah-jokowi-selamatkan-wong-cilik-dari-dampak-corona?page_num=4)
- Sala, S., Ciuffo, B., & Nijkamp, P. (2015). A systemic framework for sustainability assessment. In *Ecological Economics* (Vol. 119, pp. 314–325). <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.09.015>
- Shahidi, F. V., Ramraj, C., Sod-Erdene, O., Hildebrand, V., & Siddiqi, A. (2019). The impact of social assistance programs on population health: A systematic review of research in high-income countries. *BMC Public Health*, 19(2), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6337-1>
- Sugiyono. (2014). *Quantitative, qualitative, and mixed methods*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syawie, M., Amalia, A. D., Jayaputra, A., Suyanto, Muhtar, Pujiyanto, B., Sabarisman, M., & Johan Efendi. (2018). *Pengaruh program bantuan sosial usaha ekonomi produktif (UEP) terhadap tingkat kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat pesisir*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Taher, A. P. (2020). *Saat Bansos COVID-19 Terlambat Gara-Gara Kantong “Bantuan Presiden.”* <https://tirto.id/saat-bansos-covid-19-terlambat-gara-gara-kantong-bantuan-presiden-fgkt>
- Tan, W., Zhao, X., Ma, X., Wang, W., Niu, P., Xu, W., Gao, G. F., & Wu, G. (2020). A novel coronavirus genome identified in a cluster of pneumonia cases—Wuhan, China 2019– 2020. *China CDC Weekly*, 2(4), 61–62.
- Timans, R., Wouters, P., & Heilbron, J. (2019). Mixed methods research: what it is and what it could be. *Theory and Society*, 48(2), 193–216. <https://doi.org/10.1007/s11186-019-09345-5>
- Wenjun, C., Ziwei, F., Guoqiang, H., Mei, H., Xinrong, X., Jiabin, D., & Jianzhong, Z. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic

- on college students in China. *Psychiatry Research*, 287(March 20, 2020), 1–5. <http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L2005406993%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112934>
- Westminster College. (2020). *What Is Assessment?* <https://www.westminster.edu/about/accreditation-assessment/definition.cfm>
- William, D. (2011). *Embedded formative assessment*. Solution Tree Press.
- Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187–192. <https://doi.org/10.30604/well.95212020>
- Yusuf, A. M., Manaf, I., Anissa, L., Yulianti, A., & Putra, R. (2020). *Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Fasilitas Umum Keagamaan Masjid Dengan Metode Hazard Identification Risk Assessment (HIRA)* (pp. 284–289).